EKSPLORASI PERAN AKTIF MASYARAKAT: STRATEGI INOVATIF DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI PESISIR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Exploring the Active Role of the Community: Innovative Strategies in Mangrove Forest Management along the Coastal Area of Pangkajene and Islands Regency

Ade Irma¹, Nirawati^{1*}, Muh.Faisal M¹, Andi Nur Imran¹, Muliana Djafar¹

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Universitas Muslim Maros

*Email: nirawati@umma.ac.id

ABSTRACT

Participation refers to the involvement of the local community in the conservation efforts of mangrove forests, aiming to preserve coastal resources. This research aims to identify the forms of community participation in the management of mangrove forests in Pangkajene and Kepulauan Regency, particularly in coastal areas. The study was conducted in six districts and nine villages/urban areas in the regency, from March to August 2023. The method employed was interviews and questionnaires, involving 58 respondents residing in the coastal areas of Pangkajene and Kepulauan Regency. The collected data were quantitatively and descriptively analyzed to comprehend the forms of participation and community efforts in mangrove forest management. The research findings indicate that 93.10% of the community actively engages in various activities such as planting, seedling cultivation, and monitoring of mangrove forests. Overall, community participation in mangrove forest management is considered good. Additionally, community efforts in mangrove forest management reached 89.66%, encompassing activities like reforestation, installation of stakes/poles, watering mangrove seedlings with seawater pumps, and the use of nets. These findings affirm the positive contribution of the community to sustaining mangrove forests in the coastal region of Pangkajene and Kepulauan Regency.

Keywords: Participation; Effort; Community; Mangrove; Pangkep

ABSTRAK

Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian hutan mangrove, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di wilayah pesisir. Penelitian dilaksanakan di enam Kecamatan dan sembilan Desa/Kelurahan di Kabupaten tersebut, pada periode Maret hingga Agustus 2023. Metode yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner, melibatkan 58 responden yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memahami bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93,10% masyarakat terlibat secara positif dalam berbagai kegiatan, seperti menanam, membibit, dan mengawasi hutan mangrove. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dinilai baik. Selain itu, upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove mencapai 89,66%, yang

mencakup kegiatan penanaman kembali, pemasangan ajir/patok, penyiraman bibit mangrove dengan pompa air laut, dan pemasangan jaring. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kata kunci: Partisipasi; Upaya, Masyarakat; Mangrove; Pangkep

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai yang sangat luas, dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia (Nuraisah & Lilis Wahyuni, 2020). Salah satu ekosistem tropis yang unik adalah hutan mangrove. Hutan ini merupakan titik pertemuan antara ekosistem darat dan laut, memiliki fungsi ekologi dan ekonomi (Sribianti et al., 2021). Namun, mangrove mengalami degradasi yang signifikan akibat pola pemanfaatan yang tidak berkelanjutan (Ilyas, 2020). Kawasan mangrove memiliki peran penting bagi manusia dan hewan yang hidup di dalam dan di sekitarnya. Mangrove umumnya tumbuh di zona pasang surut dengan tanah berlumpur, lempung, dan berpasir, sering kali tergenang air laut, dengan salinitas air 2-8% (Inggi et al., 2020).

Indonesia, sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 kilometer, memiliki berbagai jenis vegetasi pesisir, termasuk mangrove. Luas mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4,25 juta hektar atau 3,98% dari total luas hutan, dengan 75% masih merupakan mangrove asli yang belum terganggu (Ilyas, 2020)

Berdasarkan pemetaan mangrove nasional tahun 2021, luas mangrove eksisting adalah sebesar 3.364.080 ha, dan luas potensi habitat mangrove adalah 756.183 Ha. Hal ini berarti luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 4.120.263 Ha, dengan kontribusi masing-masing dari luas mangrove eksisting dan potensi habitat mangrove sebesar 82% dan 18% (Direktorat Konservasi Tanah dan Air, 2021).

Hutan mangrove, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove,

menjadi tantangan dalam pengelolaannya karena melibatkan berbagai pihak, baik lokal maupun eksternal (Syah, 2020). Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kepentingan, tetapi manfaatnya akan lebih besar jika alokasi yang signifikan diberikan kepada mereka yang rentan terhadap degradasi sumber daya mangrove (Amal, 2016).

Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat muncul sebagai strategi penting dalam diskusi pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove (Hakim et al., 2018). Mangrove menawarkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang beragam, menegaskan perannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Mawardi et al., 2022). Selain itu kawasan pesisir yang didominasi mangrove juga merupakan areal penyimpanan karbon terbesar yakni 96.223,52 ton/ha (Faisal M et al., 2021) Mengingat signifikansinya bagi kelangsungan hidup manusia dan pencegahan kerusakan ekologis yang luas, perlu adanya perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan. Semua potensi, baik dalam bentuk produk maupun jasa lingkungan, harus dieksplorasi secara hati-hati dan terencana untuk memberikan manfaat maksimal bagi kemanusiaan dan pembangunan.

Partisipasi masyarakat memegang peran kunci dalam pengelolaan mangrove, karena masyarakat berada di garis depan dalam pelestarian mangrove (Alfandi et al., 2019). Meningkatkan kesadaran antar kelompok sosial dan masyarakat melalui adopsi kebijakan dan layanan lainnya penting untuk membentuk dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif kebijakan dan aktivitas. Namun,

inklusivitas ini harus memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas individu masing-masing, tanpa mengorbankan kepentingan pribadi mereka (Ilyas, 2020). Kesadaran dalam pengelolaan hutan dapat diukur dengan indikator sikap dan pengetahuan (Irundu et al., 2022).

Peningkatan partisipasi masyarakat juga bermanfaat bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Pengelolaan berbasis masyarakat bervariasi di setiap wilayah berdasarkan kondisi lokal dan komunitasnya. Masyarakat menjadi faktor penentu dalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove secara lestari (Yuliani & Herminasari, 2017).

Pengelolaan mangrove membutuhkan pertimbangan, pengembangan, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebutuhan masyarakat dalam hal konservasi, pemanfaatan produk mangrove, dan restorasi. Masyarakat lokal tidak hanya harus diprioritaskan dalam pengelolaan mangrove, tetapi juga harus secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat yang ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut (Amal & Baharuddin, 2016)

Upaya pemerintah untuk melestarikan hutan, termasuk hutan mangrove, diakomodasi dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Pasal 2, mangrove diakui sebagai ekosistem hutan, sehingga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaannya berdasarkan manfaat dan keberlanjutan, melibatkan masyarakat, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan saling mendukung. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 43, siapa pun yang mengelola dan/atau memanfaatkan hutan krisis atau

hutan produksi memiliki kewajiban untuk memulihkan hutan untuk tujuan konservasi. Oleh karena itu, pelestarian mangrove bergantung pada kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan mangrove, dengan fokus pada keberlanjutan serta peningkatan mangrove sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan petani pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam (Zainudin et al., 2015), Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat di Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir. Mangrove tidak hanya membantu memelihara produktivitas perairan pesisir, tetapi juga mendukung kehidupan penduduk di wilayah Kabupaten Maros. Selain itu, keberadaannya juga turut menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata yang menarik (Mawardi et al., 2022)

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai identifikasi bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi penting untuk mengenali bentuk dan upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam memilih dan menentukan alternatif pemecahan masalah serta mengatasi perubahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2023, pengambilan data dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar 1. Peta Administrasi Desa

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari GPS, kuesioner, kamera, alat perekam (*voice recorder*), papan board dan alat tulis menulis. Bahan yang digunakan sebagai objek dalam kegiatan penelitian ini adalah masyarakat yang berperan aktif dalam konservasi mangrove.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat terhadap partisipasi dan upaya mereka terhadap pengelolaan hutan mangrove.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui dokumentasi berupa foto, catatan-catatan, dan video.

D. Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan interaktif model analisis yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi yang berbentuk tabel tabulasi data. Penjelasan dari setiap bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam

pengelolaan Hutan Mangrove (Putri, 2020).

1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan informan dan penentuan subjek penelitian. Adapun sampel diperoleh dengan melakukan identifikasi pada 6 kecamatan yang terdapat hutan mangrove ada 16 desa akan tetapi hanya 9 desa yang mempunyai pemukiman yang didalamnya berdekatan dengan hutan mangrove yang jumlah penduduk seluruhnya yaitu 5.813 individu. Kemudian peneliti menentukan jumlah responden dengan menggunakan intensitas sampling 10%. Jadi total populasi atau sampel yaitu 58 responden.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan terhadap ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri dilengkapi pedoman wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap kawasan hutan mangrove. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data berupa bentuk pengelolaan hutan mangrove dan partisipasi serta aktivitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove.

b. Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan bentuk pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pedoman wawancara. Pedoman wawancara

tersebut berisi beberapa pola pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak pengelola dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang dipandang perlu dalam penelitian ini, dalam upaya mendukung dan melengkapi data wawancara dan observasi, sehingga data ini menjadi lengkap.

d. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan persentase (%) dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Jumlah Frekuensi/Banyaknya individu

Pembobotan tingkat partisipasi masyarakat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tanpa memisahkan berdasarkan variabel. Setiap jawaban dari responden diberi angka dengan kriteria baik, cukup baik, tidak baik. Adapun kriteria menurut (Biyatmoko, 2012) terkait persentase nilai pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase nilai pembobotan partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove

No	Kriteria	Kisaran Persentase
1.	Baik	70,1% - 100%
2.	Cukup Baik	50,1% - 70,0%
3.	Tidak Baik	20% - 50%

Sumber: Biyatmoko, 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian maka dapat diketahui karakteristik responden di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Variabel	Frekuensi	Persen(%)
1	Umur		
	15 - 19 Tahun	2	3
	20 - 29 Tahun	3	5
	30 - 39 Tahun	14	24
	40 - 49 Tahun	22	38
	>50 Tahun	17	29
	Total	58	100
2	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	47	81
	Perempuan	11	19
	Total	58	100
3	Tingkat Pendidikan		
	SD	42	72
	SMP	6	10
	SMA/SMK	6	10
	S1	2	3
	D3	2	3
	Total	58	100
4	Pekerjaan		
	Nelayan	40	69
	Wiraswasta	2	3
	Pelajar	1	2
	PNS	3	5
	IRT	10	17
	Pekebun	2	3
	Total	58	100

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 2 terkait karakteristik responden menjelaskan bahwa tabel terkait karakteristik umur responden yang diwawancarai didominasi oleh umur 40-49 Tahun yaitu sebanyak 22 orang dengan persentase 38%, hal ini menjelaskan bahwa rata-rata yang menjadi responden adalah mereka yang memahami dan mengerti tentang pengelolaan mangrove. Karakteristik jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 47 orang dengan persentase 81% adapun tingkat rata-rata pendidikannya yaitu SD sebanyak 42 responden dengan persentase 72%, karena dilihat dari pendidikan responden jenis pendidikan yang mendominasi yaitu pendidikan SD yang rata-rata bekerja sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan penyebaran hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebar di 6 Kecamatan 16 Desa/Kelurahan akan tetapi yang berpartisipasi dalam penanaman hutan mangrove hanya 5 Kecamatan 9 Desa/Kelurahan. Adapun jumlah penduduk dari 9 Desa/Kelurahan yang terlibat dalam partisipasi dan upaya dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan disajikan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam penanaman hutan mangrove wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Desa/Kelurahan (RT/RW/Lingk./Kp)	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk RT/RW/Lingk.
Pangkajene	Tekolabbua (RT IV Toli-Toli)	2717	679
Bungoro	Desa Bulu Cindea (Dusun Biringkassi)	4183	1403
Labakkang	Pundata Baji (Lingk. Maccini Baji)	4929	257
	Bontomanai (Kampung Tanarajae)	3054	150
	Borimasunggu (Kampung Padang Padangeng)	4561	120
Ma'rang	Tamangapa (RT 07 Bawasalo)	3142	176
Mandalle	Mandalle (RT 05 dan RT 07 dusun Cilellang)	2615	837
	Tamarupa (RT 01 Kekeang Barat)	2196	795
	Desa Boddie (Dusun Lempangan dan Dusun Lammasa)	2126	1396
	Total	29523	5813

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 3 diatas terdapat 4 Desa/Kelurahan yang mempunyai kelompok tani mangrove. Adapun nama kelompok tani di 4 Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar nama kelompok tani mangrove wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Nama Kelompok	Kecamatan	Wilayah	Nama Ketua
1	Nelayan Sejahtera	Pangkajene	Tekolabbua	Hamzah
2	Maccini Baji	Labakkang	Kel. Pundata Baji	Firman
3	Kaleroang	Mandalle	Desa Tamarupa	Arman
4	KBR Marannu	Mandalle	Desa Mandalle	Sapri

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Tabel 4. Persentase untuk setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	Persen (%)
1	Menanam	35	60,34
2	Membibit	6	10,34
3	Mengawasi	13	22,41
4	Tidak Berpartisipasi	4	6,90
	Total	58	100

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan persentase dari masing-masing bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terbagi menjadi empat, yaitu menanam sebesar 60,34%, membibit sebesar 10,34%, mengawasi sebesar 22,41% dan ada juga

masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi sebesar 6,90%.

Tabel 5. Persentase untuk setiap upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Upaya Masyarakat	Frekuensi	Persen (%)
1	Melakukan Penanaman Kembali	26	44,83
2	Pemasangan Ajir/Patok	12	20,69
3	Menyiram Bibit Mangrove	4	6,90
4	Pemasangan Jaring	10	17,2
5	Tidak ada Upaya	6	10,34
	Total	58	100

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan persentase dari masing-masing upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terbagi menjadi lima, yaitu melakukan penanaman kembali sebanyak 44,83%, pemasangan ajir/patok sebanyak 20,69%, menyiram bibit mangrove sebanyak 6,90%, pemasangan jaring sebanyak 17,2% dan ada juga masyarakat yang tidak mempunyai upaya yaitu sebanyak 10,34%.

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Berdasarkan hasil analisis terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di 9 Desa/Kelurahan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terlibat dalam penanaman dan pengelolaan hutan mangrove dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tanggapan responden mengenai bentuk partisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove.

Tanggapan	Bobot Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	Persen (%)
Iya	2	54	108	93,10
Tidak	1	4	4	6,90
Tidak Tahu	0	0	0	0
	Total	58	112	100

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dari 9 Desa/Kelurahan ikut berpartisipasi dengan memberikan jawaban iya sebanyak 93,10% terhadap partisipasinya terhadap pengelolaan hutan mangrove adapun partisipasinya yaitu menanam, membibit dan mengawasi hutan mangrove. Kemudian dari 9 Desa/Kelurahan itu terdapat 4 Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok tani yang mengelola hutan mangrove dan kelompok tani itu tersebar pada Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Tekolabbua,

Kelurahan Pundata baji, Desa Tamarupa dan Desa Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemeliharaan dan tahap evaluasi.

1. Upaya Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Berdasarkan hasil analisis terkait upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di 9 Desa/Kelurahan di Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam upaya mereka terhadap penanaman dan pengelolaan hutan mangrove dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Tanggapan masyarakat mengenai upaya dalam pengelolaan hutan mangrove wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Tanggapan	Bobot Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	Persen(%)
Iya	2	52	104	89,66
Tidak	1	6	6	10,34
Tidak Tahu	0	0	0	0
Total		58	110	100

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa sebagian besar responden dari 9 Desa/Kelurahan ikut berpartisipasi terkait upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove memberikan jawaban iya sebanyak 89,66 persen, adapun upaya partisipasinya yaitu melakukan penanaman kembali, pemasangan ajir/patok, menggunakan jaring agar bibit mangrove tidak mudah terbawa ombak dan memompa air dari laut untuk menyiram bibit mangrove. Dari 9 Desa/Kelurahan itu terdapat 4 Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok tani yang mengelola hutan mangrove dan kelompok tani itu tersebar pada Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Tekolabbua, Kelurahan Pundata baji, Desa Tamarupa dan Desa Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan bahwa sebanyak 93,10% dari responden aktif berpartisipasi dalam upaya pengelolaan hutan mangrove. Hasil ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang dianggap baik, sejalan dengan nilai pembobotan pada Tabel 1.

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat melibatkan kegiatan penanaman sebesar 60,34%, pembibitan sebesar 10,34%, pengawasan sebesar 22,41%, sementara sebagian kecil masyarakat (6,90%) tidak berpartisipasi sama sekali.

Partisipasi masyarakat dalam penanaman hutan mangrove di lima Desa/Kelurahan muncul dari kesadaran akan pentingnya mangrove sebagai penahan gelombang, pembatas tambak, dan pelindung terhadap angin. Konsep ini sejalan dengan pandangan (Syah, 2020), yang mengemukakan bahwa mangrove memiliki peran signifikan sebagai penahan gelombang, pembatas angin, pengatur angin, penangkap sedimen, dan penghalang intrusi air asin.

Analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata responden yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove memiliki usia sekitar 40 tahun, didominasi oleh laki-laki dengan mayoritas berpendidikan SD. Mayoritas dari mereka, yang umumnya bekerja sebagai nelayan, memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan hutan mangrove, termasuk penanaman mangrove. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terutama yang bekerja sebagai nelayan, telah lama tinggal di sana dan memahami pentingnya hutan mangrove sebagai tempat tinggal bagi hewan kecil seperti kepiting dan ikan kecil, yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang saling terkait, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi (Saprudin & Halidah, 2012).

Tahap perencanaan melibatkan pertemuan anggota tani mangrove dan masyarakat untuk merancang rencana kegiatan. Diskusi pada tahap ini mencakup penyusunan usulan, penentuan lokasi penanaman, jarak tanam, dan persiapan ajir/patok. Sebagai contoh, kelurahan Tekolabbua dan Pundata Baji melakukan pembibitan mangrove untuk penanaman kembali, sementara Desa Tamarupa dan

Mandalle mendapatkan bibit mangrove dari BPDAS.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat mencakup penanaman di lokasi yang telah ditentukan. Setelah penanaman, ajir/patok diberikan untuk setiap bibit guna melindungi mereka dari ombak, dan jaring juga dipasang pada ajir/patok tersebut.

Tahap pemeliharaan melibatkan pemantauan kondisi bibit yang telah ditanam di lokasi penanaman (Amal & Baharuddin, 2016). Masyarakat melakukan pengamatan dan mengganti bibit yang tidak bertahan hidup dengan yang baru. Namun, beberapa lokasi, seperti Kelurahan Tekolabbua, Pundata Baji, dan Desa Tamarupa, mengalami hambatan pertumbuhan karena ombak, tiram, dan lumut. Sementara itu, Desa Mandalle menghadapi kekurangan air karena penanaman di atas batas pasang surut air laut.

Tahap evaluasi, yang dilakukan dari perencanaan hingga pemeliharaan, bertujuan untuk menilai kondisi hutan mangrove. Penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tekolabbua dan Pundata Baji menunjukkan kondisi yang baik, sementara Desa Tamarupa dan Mandalle masih dalam tahap pemantauan karena bibit mangrove baru-baru ini ditanam.

Para responden menyatakan bahwa pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi kendala, terutama terkait ombak. Serangan ombak terkait dengan waktu tanam yang seringkali tidak diperhatikan oleh instansi terkait atau pihak lain. Standar penanaman mangrove yang ideal sering kali tidak diikuti, mempengaruhi tingkat keberhasilan pertumbuhan bibit mangrove ((Kusumawati et al., 2019)

2. Upaya Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Berdasarkan Tabel 8, dapat diperhatikan bahwa sebanyak 89,66% dari responden terlibat dalam upaya pengelolaan hutan mangrove, menggunakan ajir/patok dan jaring sebagai alat bantu untuk melindungi bibit mangrove dari potensi terbawa ombak (Sari & Rosalina, 2014). Selain itu,

masyarakat juga melakukan rehabilitasi pada lahan mangrove dengan menggantikan bibit yang mati dengan bibit yang baru. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dianggap baik, sejalan dengan persentase pembobotan pada Tabel 1. Upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dibagi menjadi lima kategori, yakni penanaman kembali sebesar 44,83%, pemasangan ajir/patok sebesar 20,69%, penyiraman bibit mangrove sebesar 6,90%, pemasangan jaring sebesar 17,2%, dan sebagian kecil masyarakat (10,34%) tidak memiliki upaya khusus.

Rata-rata responden yang aktif dalam upaya pengelolaan hutan mangrove memiliki usia sekitar 40 tahun, didominasi oleh laki-laki yang bekerja sebagai nelayan. Para nelayan mengakui bahwa selain manfaat mangrove sebagai penahan ombak dan tempat tinggal ikan kecil, mangrove juga memberikan manfaat pribadi bagi mereka sebagai penahan tanah tambak dan tempat perlindungan dari paparan sinar matahari. Namun, terdapat satu kelompok tani mangrove, yaitu kelompok tani KBR Marannu di Kecamatan Mandalle Desa Mandalle RT 05 dan RT 07 dusun Cilellang, yang menghadapi kendala kekurangan air pada bibit mangrove yang telah ditanam. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat di sana berupaya memompa air dari laut menggunakan pompa air untuk menyiram bibit mangrove. Meskipun demikian, beberapa mangrove tetap tidak tumbuh atau mengalami kematian. Upaya terus dilakukan agar mangrove yang mengalami kekurangan air dapat tumbuh dengan baik dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi bentuk partisipasi dan upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di lima Kecamatan dan sembilan Desa/Kelurahan mencapai tingkat yang baik, sebesar 93,10%. Jenis partisipasi melibatkan kegiatan seperti penanaman (60,34%), pembibitan (10,34%), dan pengawasan (22,42%).
2. Upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove juga menunjukkan hasil positif, dengan persentase 89,66% dikategorikan sudah baik. Upaya tersebut mencakup penanaman kembali (44,83%), pemasangan ajir/patok (20,69%), penyiraman bibit mangrove (6,90%), pemasangan jaring (17,2%), dan sebagian kecil masyarakat (10,34%) yang tidak memiliki upaya khusus.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa masyarakat di wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan hutan mangrove. Tingkat partisipasi yang tinggi dan beragamnya upaya yang dilakukan masyarakat mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap pelestarian sumber daya alam tersebut. Diharapkan, kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan program pengelolaan hutan mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti, masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu :

1. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk perluasan penelitian dan mendalami pemahaman terkait dampak positif partisipasi dan upaya masyarakat terhadap keberlanjutan hutan mangrove, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi,
2. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hutan mangrove dan

manfaatnya melalui program edukasi dan sosialisasi di tingkat lokal,

3. Mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kuat dan terorganisir untuk memperkuat partisipasi dan upaya bersama dalam pengelolaan hutan mangrove, dan
4. Menyusun regulasi yang jelas terkait pengelolaan hutan mangrove, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41.
- Amal, & Baharuddin, I. I. (2016). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientific Pinisi*, 2(1), 1–7.
- Biyatmoko, D. (2012). *EnviroScienteeae*, 8, 89–101.
- Direktorat Konservasi Tanah dan Air. (2021). *Peta Mangrove Nasional*.
- Faisal M, M., Djafar, M., & Nurnawati, A. A. (2021). Pemanfaatan Citra ALOS Palsar untuk Estimasi Kandungan Serapan Karbon di Wilayah Pesisir Kabupaten Maros. *Jurnal Eboni*, 3(1), 49–56.
- Hakim, K. L., Setiawan, B., & Radjiman, G. (2018). Pengelolaan Hutan mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes. *Media Agrosains*, 4(01), 9–15.
- Ilyas, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kapasitas Pariwisata Mangrove di Kabupaten Pangkep. *Skripsi*.
- Inggi, P., Harry, I. J., & Alfian, P. H. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Sebagai Objek Daya Tarik Wisata di Desa Cendi Manik Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko*

- Bencana*, 2, 115–120.
- Irundu, D., Indhasari, F., A, W. U., & Sartika. (2022). *Persepsi Masyarakat KTH Buttu Puang Untuk Pengembangan Budidaya Trigona sp. Di Desa Mirring Kabupaten Polman*. 2(01), 1–11.
- Kusumawati, I., Marlian, N., & Ulfa, M. (2019). Analisis Pemanfaatan Mangrove Oleh Masyarakat Pesisir Dan Partisipasinya Terhadap Pelestarian Mangrove Di Gampong Kuala Bubon. *Jurnal Perikanan Tropis*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.35308/jpt.v6i1.1182>
- Mawardi, I., Imran, A. N., & Djafar, M. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Jurnal Eboni*, 4(X).
- Nuraisah & Lilis Wahyuni. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Kampung Mekar Jaya. *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi*, 0042, 73–82. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Saprudin, S., & Halidah, H. (2012). Potensi Dan Nilai Manfaat Jasa Lingkungan Hutan Mangrove Di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 9(3), 213–219. <https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.3.213-219>
- Sari, S. P., & Rosalina, D. (2014). Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove Pada Lahan Pasca Penambangan Timah Di Kabupaten Bangka Selatan. *Maspari Journal*, 6(2), 71–80.
- Sribianti, I., Abdullah, A. A., Sultan, Hikmah, Muthmainnah, Suharni, Naufal, & Nirwana. (2021). Analisis Potensi dan Kelayakan daya Tarik Objek Wisata Alam Hutan Mangrove Pulau Panikiang (Analysis Of Potential And Feasibility Of Attraction Of Natural Tourism Objects Of Mangrove Forest Panikiang Island). *Jurnal Eboni*, 3(2), 64–72.
- Syah, A. F. (2020). Penanaman Mangrove sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Desa Socah. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1), 13–16. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6909>
- Yuliani, S., & Herminasari, N. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 6(2), 42–53. <https://doi.org/10.21009/jgg.062.04>
- Zainudin, Z., Sumardjo, S., & Susanto, D. (2015). Perilaku Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 11(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i1.9936>